



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

TAHUN 2025

 <https://disdikbud.lhokseumawekota.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan kualitas manusia yang berdaya saing yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-Nya. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin*

Lhokseumawe, 26 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE,



[Handwritten signature in blue ink]

Yuswardi, SKM, M.S.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19740922 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	2
1.3 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	26
1.4 Landasan Hukum	28
1.5 Sistematika Penulisan	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe	30
2.2 Indikator Kinerja Utama	32
2.3 Perjanjian Kinerja	34
2.4 Pohon Kinerja	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	49
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	51
3.3 Analisis Capaian Organisasi	55
3.4 Analisis Efisiensi	89
3.5 Akuntabilitas Keuangan	92
BAB IV PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	20
Tabel 1.2	Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	21
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural	22
Tabel 1.4	Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	23
Tabel 1.5	Rincian Pegawai Menurut Pangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	24
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ..	32
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	33
Tabel 2.3	Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 2.4	Komposisi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	36
Tabel 2.5	Komposisi Belanja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	37
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	50
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja	50
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025	52

Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025	53
Tabel 3.5	Nilai Hasil Angka Kelulusan SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025	57
Tabel 3.6	Nilai Hasil Angka Partisipasi Kasar SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025 ..	60
Tabel 3.7	Nilai Hasil Angka Partisipasi Kasar SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025 ..	60
Tabel 3.8	Nilai Hasil Angka Partisipasi Murni SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025..	64
Tabel 3.9	Nilai Hasil Angka Partisipasi Murni SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025..	64
Tabel 3.10	Nilai Hasil Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025 ...	67
Tabel 3.11	Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	90
Tabel 3.12	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Cascading Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	39
------------	---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	20
Grafik 1.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan	22
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural	23

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025	53
Diagram 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025	54

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe

***“Terwujudnya Pendidikan Yang Melahirkan Insan Cerdas,
Kreatif, Mandiri Dan Berkarakter Islami”***

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe mewujudkan visi tersebut melalui:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan
		Angka Partisipasi Kasar
		Angka Partisipasi Murni
		Angka Partisipasi Sekolah
1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan
		Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal
1.3	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
1.4	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe telah menetapkan 8 (delapan) IKU melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025.

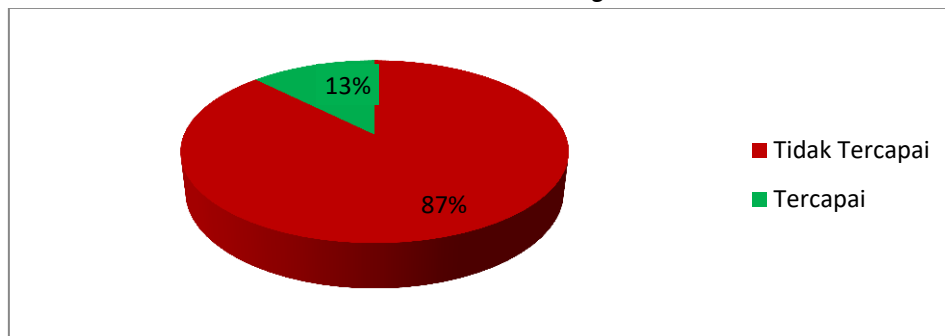
Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
1	Angka Kelulusan	Persen	100	100	Tercapai	
2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	100	99,49	Tidak Tercapai	
3	Angka Partisipasi Murni	Persen	100	87,65	Tidak Tercapai	
4	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	100	98,17	Tidak Tercapai	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal						
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	55	0	Tidak Tercapai	
6	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	Persen	76	27	Tidak Tercapai	
Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya						
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	57,67	4	Tidak Tercapai	
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						
8	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	55,56	Tidak Tercapai	
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2025						

Hasil pengukuran capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal menunjukkan hasil atas 8 (delapan) IKU yaitu sebanyak 1 IKU dengan predikat **Tercapai** dan 7 IKU dengan predikat **Tidak Tercapai**.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

**Diagram Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025**



hasil pengukuran atas capaian capaian 8 (delapan) IKU menunjukkan hasil sebesar **13%** atau 1 IKU **Tercapai** dan **87%** atau 7 IKU **Tidak Tercapai**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsure pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan

strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).

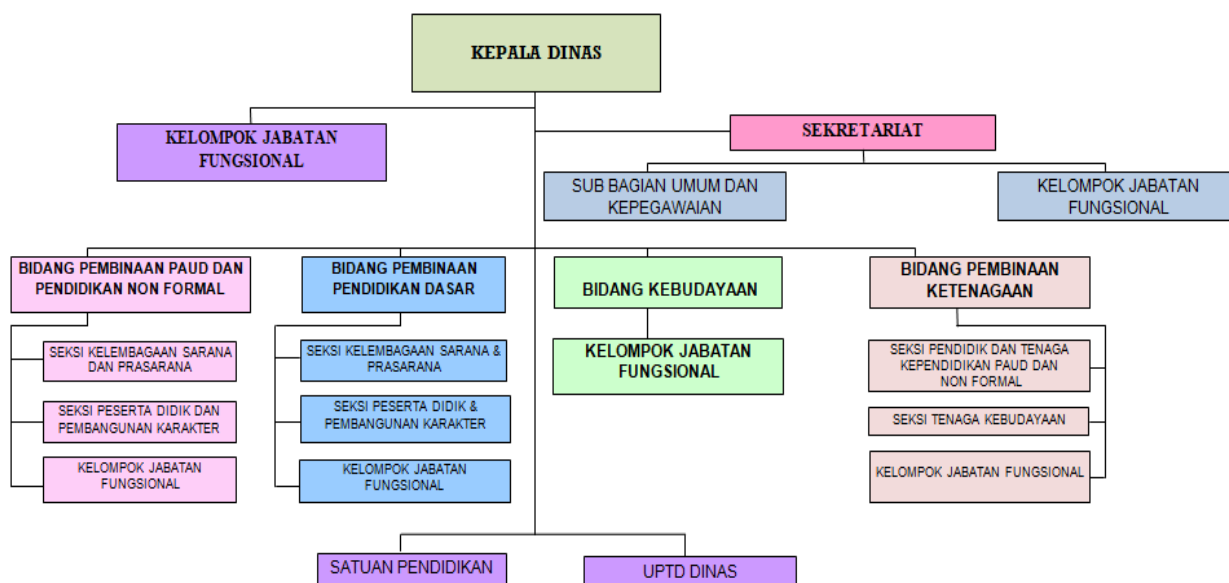
1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 16 Desember 2024 ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:



Sumber: Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 50 tahun 2024

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan rencana dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- Pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- Perumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- Perumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- Perumusan rencana dan program kerja bidang Kebudayaan;

- Perumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan Ketenagaan;
- Pengendalian dan mengawasi terhadap perkembangan pendidikan; Pelaksanaan pembinaan umum tata usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data dan informasi, kehumasan, hukum dan perundang-undangan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

- Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan PAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangga di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe membawahi subbagian sebagai berikut:

A. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas sebagai berikut:

- Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban;
- Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban;
- Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban.

B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; dan
- Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan.

- Penyusunan bahan pengelolaan barang milik daerah di bidang PAUD dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan.

C. PERENCANA AHLI MUDA

Tugas Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda adalah sebagai berikut;

- Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- Melakukan penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.

3. BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta dalam peserta didik dan pembangunan karakter. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik

dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

- Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepemimpinan dalam Bidang PAUD terdiri atas:

A. FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA

Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas sebagai berikut;

- Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang kurikulum dan penilaian pembinaan dan pengembangan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

B. FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA

Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas sebagai berikut;

- Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang kurikulum dan penilaian pembinaan dan pengembangan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

C. SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA

Seksi Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas;

- Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

D. SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas;

- Mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Melakukan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Menyusun Pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepemimpinan dalam Bidang Dikdas terdiri atas:

A. PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA

Pengembang Kurikulum Ahli Muda Mempunyai Tugas Sebagai Berikut;

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

B. SEKSI KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA

Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

C. SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

5. BIDANG KEBUDAYAAN

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Cagar Budaya dan Museum, Sejarah dan Tradisi, dan Kesenian mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- Penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian

tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kota;
- Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kota;
- Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Kota;
- Penyusunan bahan pengelolaan museum Kota;
- Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepemimpinan dalam Bidang Kebudayaan terdiri atas:

A. PAMONG BUDAYA AHLI MUDA

Pamong Budaya Ahli Muda mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.
- Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- Penyusunan bahan pembinaan kesenian;

- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan kesenian.

6. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Bidang Pembinaan Ketenagaan merupakan unsur pelaksana di bidang PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal, PTK Pendidikan Dasar, dan Tenaga Kebudayaan, mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

- Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepemimpinan pada Bidang Ketenagaan adalah sebagai berikut:

A. SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas sebagai berikut:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

B. SEKSI PESERTA DIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (ANALIS KEBIJAKAN)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

C. SEKSI TENAGA KEBUDAYAAN

Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas:

- Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, SDM yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe per Desember 2025 sebanyak 62 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bagian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

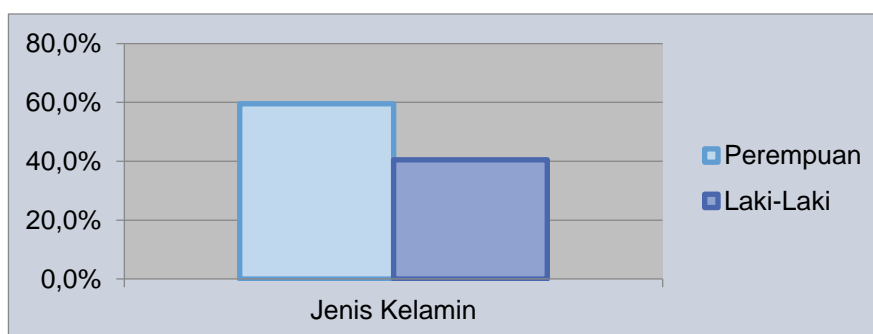
Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

No	Bagian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris Dinas	1	-	1
3	Kepala Bidang	1	3	4
4	Kepala Subbagian	1	-	1
5	Kepala Seksi	3	3	6
6	Jabatan Fungsional	9	10	19
7	Pelaksana	15	15	30
8	PPPK	14	35	49
Jumlah		45	66	111

Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2025

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 45 orang atau 40,5%, dan jumlah Perempuan sebanyak 66 orang atau sebesar 59,5%.

Grafik 1.1
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN



Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2025

Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

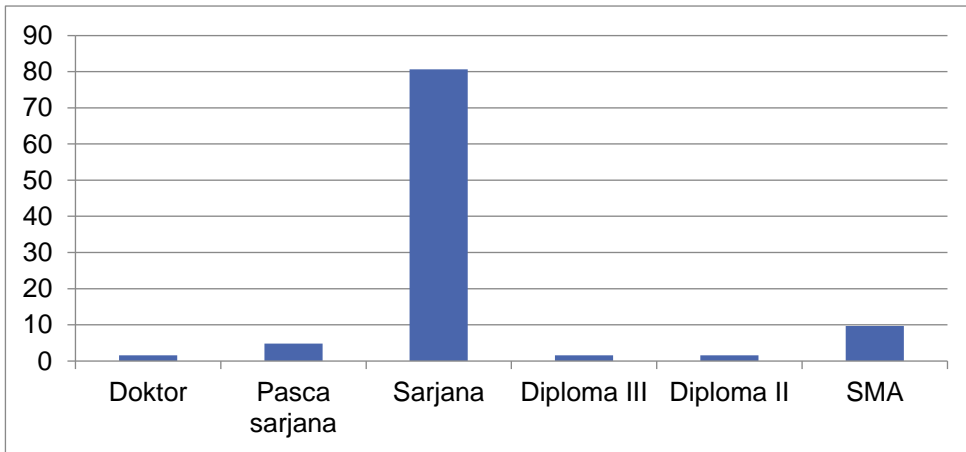
Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan/Bagian	Pendidikan							
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	-	-
3	Bidang Dikdas	-	-	-	-	-	3	-	-
4	Bidang Pembinaan Ketenagaan	-	-	-	-	-	3	-	-
5	Bidang Kebudayaan	-	-	-	-	-	1	-	-
6	Bidang PAUD & PNF	-	-	-	-	-	2	1	-
7	Bidang Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-
8	Bidang Perencanaan	-	-	-	-	-	1	-	-
9	Sub Bagian Umum & Kepegawaian BMD	-	-	-	-	-	1	-	-
10	Jabatan Fungsional	-	-	6	1	1	38	-	1
Jumlah		0	0	6	1	1	50	3	1

Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2025

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Grafik 1.2, dimana jumlah tingkat Pendidikan S3 sebanyak 1 orang atau 1,61%, tingkat Pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 4,84%, tingkat Pendidikan S1 sebanyak 50 orang atau 80,65%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 1 orang atau 1,61%, tingkat Pendidikan Diploma 2 sebanyak 1 orang atau 1,61% dan tingkat Pendidikan SMA sebanyak 6 orang atau 9,68%.

Grafik 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber :Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2025

Jumlah pegawai yang telah mengikuti latihan jabatan struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini :

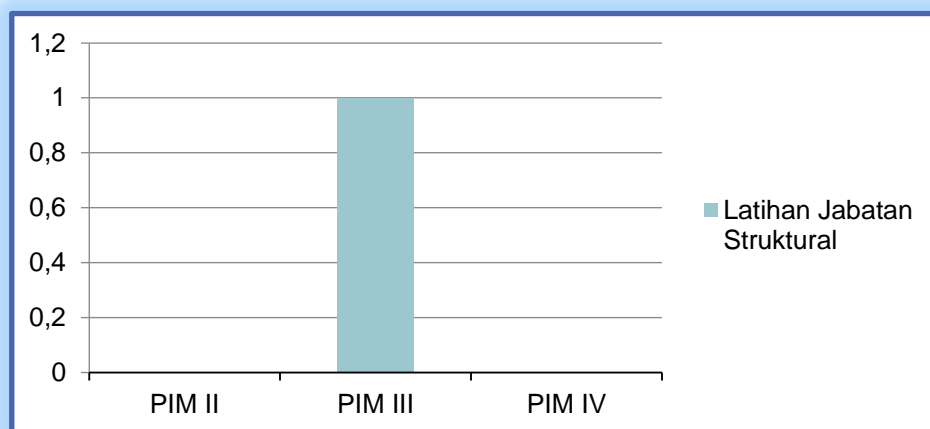
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural

Latihan Jabatan	Jumlah
PIM II	-
PIM III	1
PIM IV	-
Total	1

Sumber :Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2025

Komposisi jumlah pegawai yang telah mengikuti Latihan Jabatan Struktural dapat dilihat pada Grafik 1.3, dimana sebanyak 1 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM III.

Grafik 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural



Jumlah jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon						Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	4	-	-	4
4	Kepala Subbagian/Seksi	-	-	-	-	9	-	9
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	47
TOTAL								62

Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2025

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 15 jabatan struktural. Dimana Eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III.b sebanyak 4 (empat) orang, Eselon IV.a sebanyak 9 (sembilan) orang, dan Jabatan Fungsional sebanyak 47 orang. Selanjutnya, rincian pegawai Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Bidang Dikdas	-	-	3	-
4	Bidang Pembina Ketenagaan	-	-	2	1
5	Bidang Kebudayaan	-	-	1	-
6	Bidang PAUD & PNF	-	-	2	1
7	Bagian Keuangan	-	-	-	1
8	Bagian Perencanaan	-	-	1	-
9	Bagian Umum & Kepegawaian	-	-	1	-
10	Jabatan Fungsional	3	4	36	4
Jumlah		3	4	46	9

Sumber: Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 9 orang, pangkat/golongan III sebanyak 46 orang, pangkat/golongan II sebanyak 4 orang, dan pangkat/golongan I sebanyak 3 orang.

Secara keseluruhan jumlah personil SDM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin

Jabatan	S3	S2	S1	DI,II,III	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEPALA DINAS	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
SEKRETARIS	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
SUB BAGIAN KEUANGAN											
Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fungsional	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Staf PNS	-	-	4	1	-	-	-	5	-	5	5
PPPK	-	-	3	5	-	-	-	8	1	7	8
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN											
Struktural	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Staf PNS	-	-	5	-	1	-	-	6	4	2	6
PPPK	-	-	2	1	7	-	-	10	4	6	10
SUB BAGIAN PERENCANAAN											
Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Staf PNS	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
PPPK	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2
BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL											
Struktural	-	1	2	-	-	-	-	3	-	3	3
Fungsional	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2
Staf PNS	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2
PPPK	-	-	4	-	1	-	-	5	1	4	5
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR											
Struktural	-	-	3	-	-	-	-	3	1	2	3
Fungsional	-	-	3	-	-	-	-	3	-	3	3
Staf PNS	-	-	2	-	1	-	-	3	1	2	3
PPPK	-	-	4	1	-	-	-	5	-	5	5
BIDANG KEBUDAYAAN											
Struktural	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Fungsional	-	-	4	-	3	-	-	7	3	4	7
Staf PNS	-	-	5	1	-	-	-	6	4	2	6
PPPK	-	-	1	-	5	-	-	6	5	1	6
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN											
Struktural	-	-	3	-	-	-	-	3	2	1	3
Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
Staf PNS	1	-	5	-	1	-	-	7	4	3	7
PPPK	-	-	4	-	1	-	-	5	1	4	5
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL											
Fungsional	-	-	3	-	-	-	-	3	1	2	3
PPPK	-	-	8	-	-	-	-	8	2	6	8
TOTAL	1	3	78	9	20	-	-	111	45	66	111

Sumber :Disdikbud Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan Tabel 1.6 diatas, terdapat jumlah keseluruhan personil SDM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe sebanyak 111 orang yang terdiri dari 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 49 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

1.3 ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RKPK Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada SDGS;
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Stategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
3. Penguatan daya saing usaha
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Provinsi Aceh antara lain meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan aceh;
5. Mensukseskan Pemilu serentak dan PON XXI.

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Pendidikan;
2. Pertumbuhan Ekonomi;
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
4. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
6. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah peningkatan kualitas pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas guru serta peserta didik, kemudian pendistribusian guru secara merata pada setiap kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat

mencetak Tenaga kerja yang terampil sehingga mampu bersaing di era globalisasi.

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berpedoman pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menindaklanjuti perubahan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe mendukung pencapaian misi 3 Pemerintah Kota Lhokseumawe, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi mengupayakan sistem pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan nilai-nilai agama.

1) Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah:

“TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG MELAHIRKAN INSAN CERDAS, KREATIF, MANDIRI DAN BERKARAKTER ISLAMI”

2) Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe tersebut, dilaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur yang dapat memberi pelayanan pendidikan optimal dan professional,
- b. Mewujudkan proses pendidikan yang unggul dalam rangka membangun manusia cerdas, sehat, kreatif, dan islami,
- c. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan yang professional sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, dan
- d. Mewujudkan pembinaan pendidikan dan kebudayaan di sekolah.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Pendidikan - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal berdasarkan Nilai-nilai syariat islam - Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Kelulusan - Angka Partisipasi Kasar - Angka Partisipasi Murni - Angka Partisipasi Sekolah - Persentase budaya lokal yang dilestarikan - Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal - Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah
2.	Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat tercapai

sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe telah di tetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Nomor 015 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2			
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025			
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan	%
		Angka Partisipasi Kasar	%
		Angka Partisipasi Murni	%
		Angka Partisipasi Sekolah	%
1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	%
		Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	%
1.3	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	%
1.4	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	%

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu:

1. Angka Kelulusan;
2. Angka Partisipasi Kasar;
3. Angka Partisipasi Murni;
4. Angka Partisipasi Sekolah;
5. Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan;
6. Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal;
7. Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; dan
8. Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2021, dan Target Akhir
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Capaian (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan							
1	Angka Kelulusan	100	100	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar	100	104,33	102,75	102,75	100,325	99,49
3	Angka Partisipasi Murni	100	99,67	98,62	94,58	92,625	87,65
4	Angka Partisipasi Sekolah	100	99,69	99,72	99,625	98,17	98,17
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal							
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	57,67	-	-	50	52	44
6	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	55	-	-	7,8	13,76	27
Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya							
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	76	-	-	50	52	4
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
8	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	100	-	-	66,67	75	55,56

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran Tahun 2025 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025 Anggaran Belanja (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
Jumlah Pendapatan	Rp. 0
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	
	Rp. 209.426.449.956
Belanja Pegawai	Rp.175.902.797.737
Belanja Barang dan Jasa	Rp.24.839.269.942
Belanja Hibah	Rp. 8.684.382.277
BELANJA MODAL	
	Rp. 19.655.157.621
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 5.982.994.096
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 6.360.705.525
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 117.000.000
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp. 7.194.458.000
Jumlah Belanja	Rp. 229.081.607.577
Total Surplus/(Defisit)	(Rp. 229.081.607.577)
Pembiayaan Daerah	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Neto	Rp. 0

Sumber: DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan didalam dokumen Perjanjian Kinerja untuk belanja langsung dan belanja tidak

langsung pada ABPK Tahun 2025 dengan keseluruhan jumlah anggaran sebesar Rp. 229.081.607.577,-

Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe yang telah diperjanjian untuk mewujudkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBK Perubahan Tahun 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 229.461.233.368,-

Tabel 2.5
Komposisi Belanja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025 Anggaran Belanja (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
Jumlah Pendapatan	Rp. 0
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	Rp. 208.909.776.839
Belanja Pegawai	Rp.175.743.476.335
Belanja Barang dan Jasa	Rp.25.111.319.504
Belanja Hibah	Rp. 7.586.900.000
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 468.081.000
BELANJA MODAL	Rp.20.551.456.529
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 8.191.615.114
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 7.208.213.215
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 117.000.000
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp. 5.034.628.200

Jumlah Belanja	Rp. 229.461.233.368
-----------------------	----------------------------

Total Surplus/(Defisit)	(Rp. 229.461.233.368)
--------------------------------	------------------------------

Pembiayaan Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
------------------------------	-------

Jumlah Pengeluaran	Rp. 0
--------------------	-------

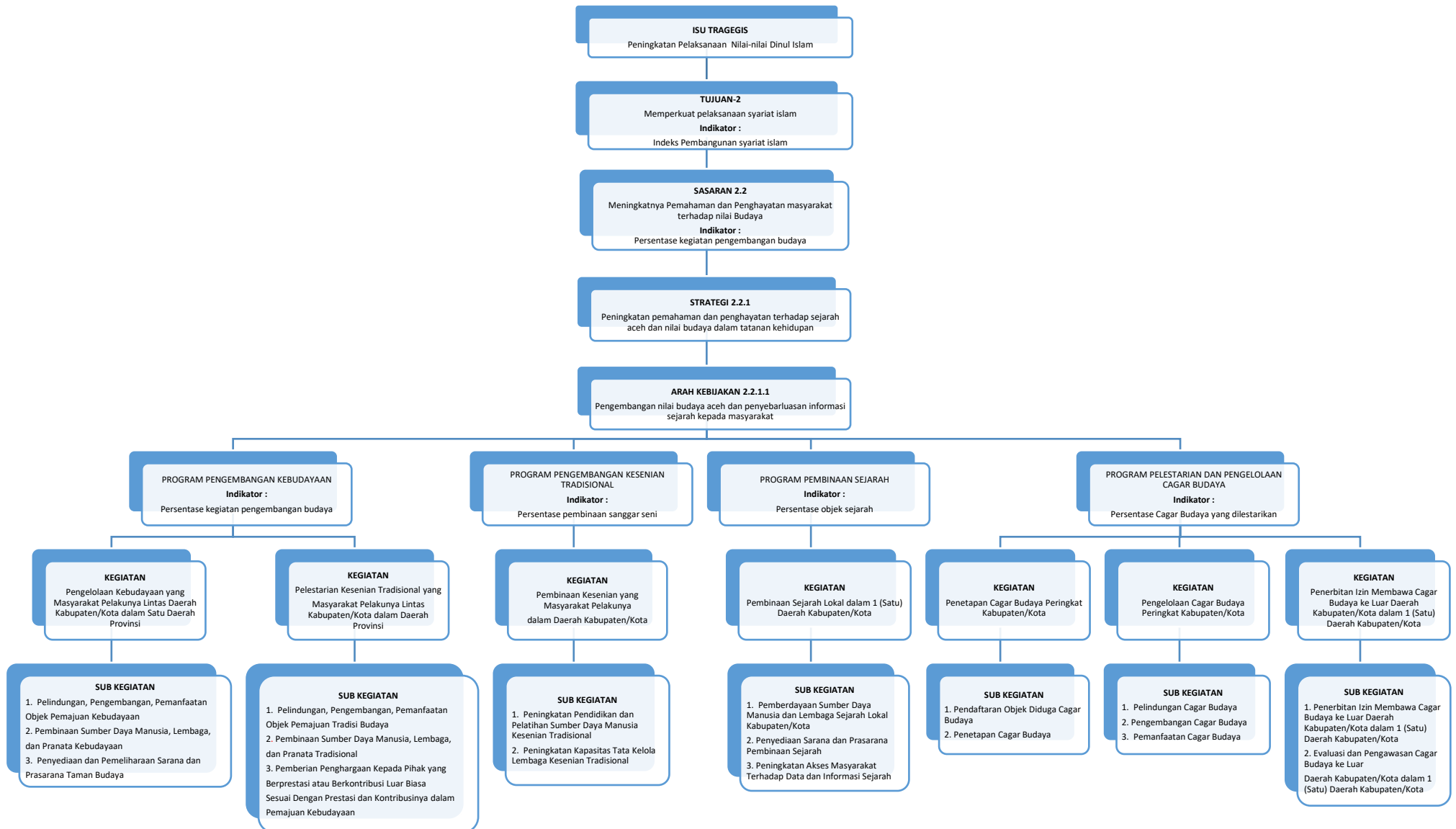
Pembiayaan Neto	Rp. 0
-----------------	-------

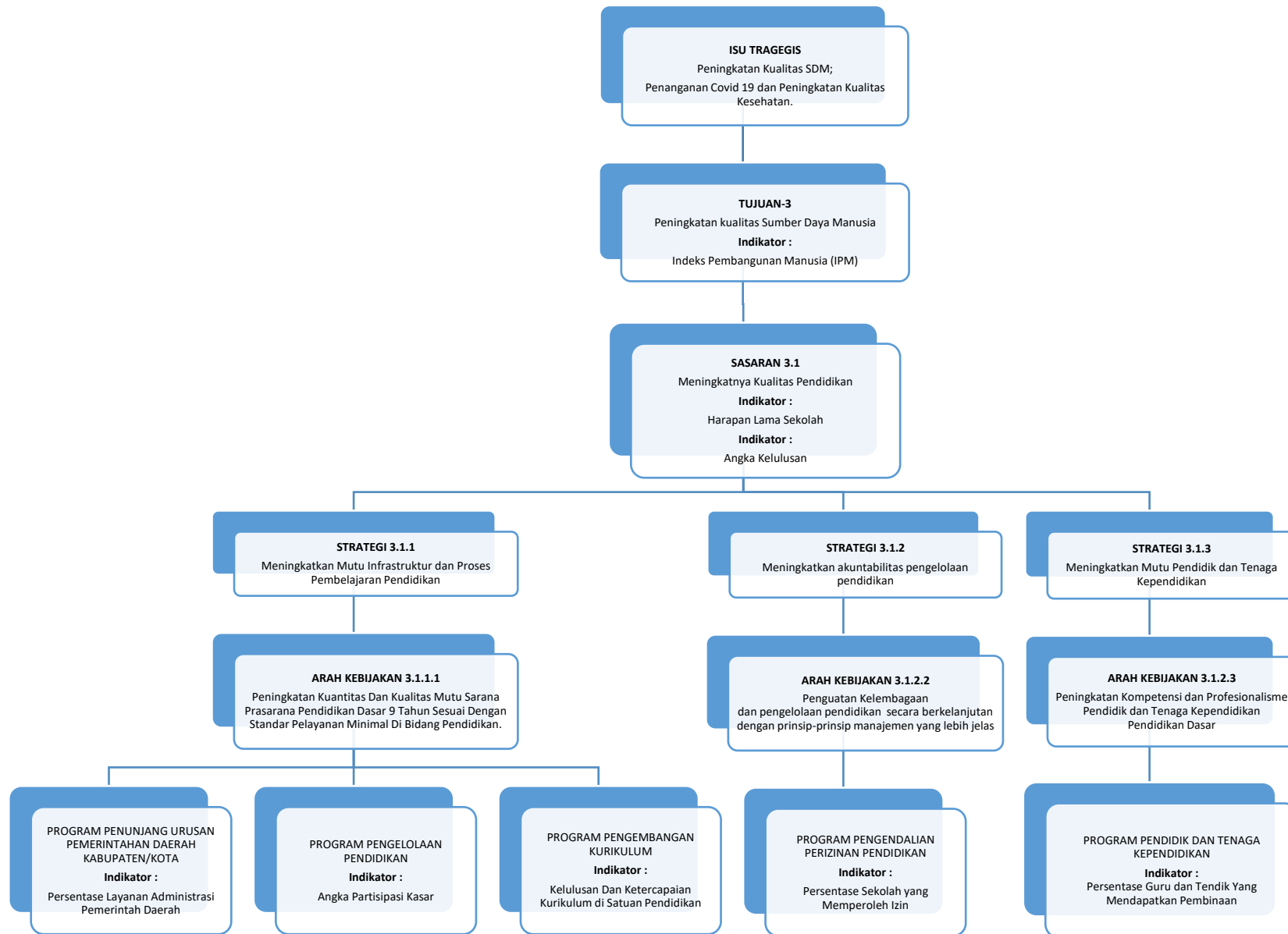
Sumber: DPA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

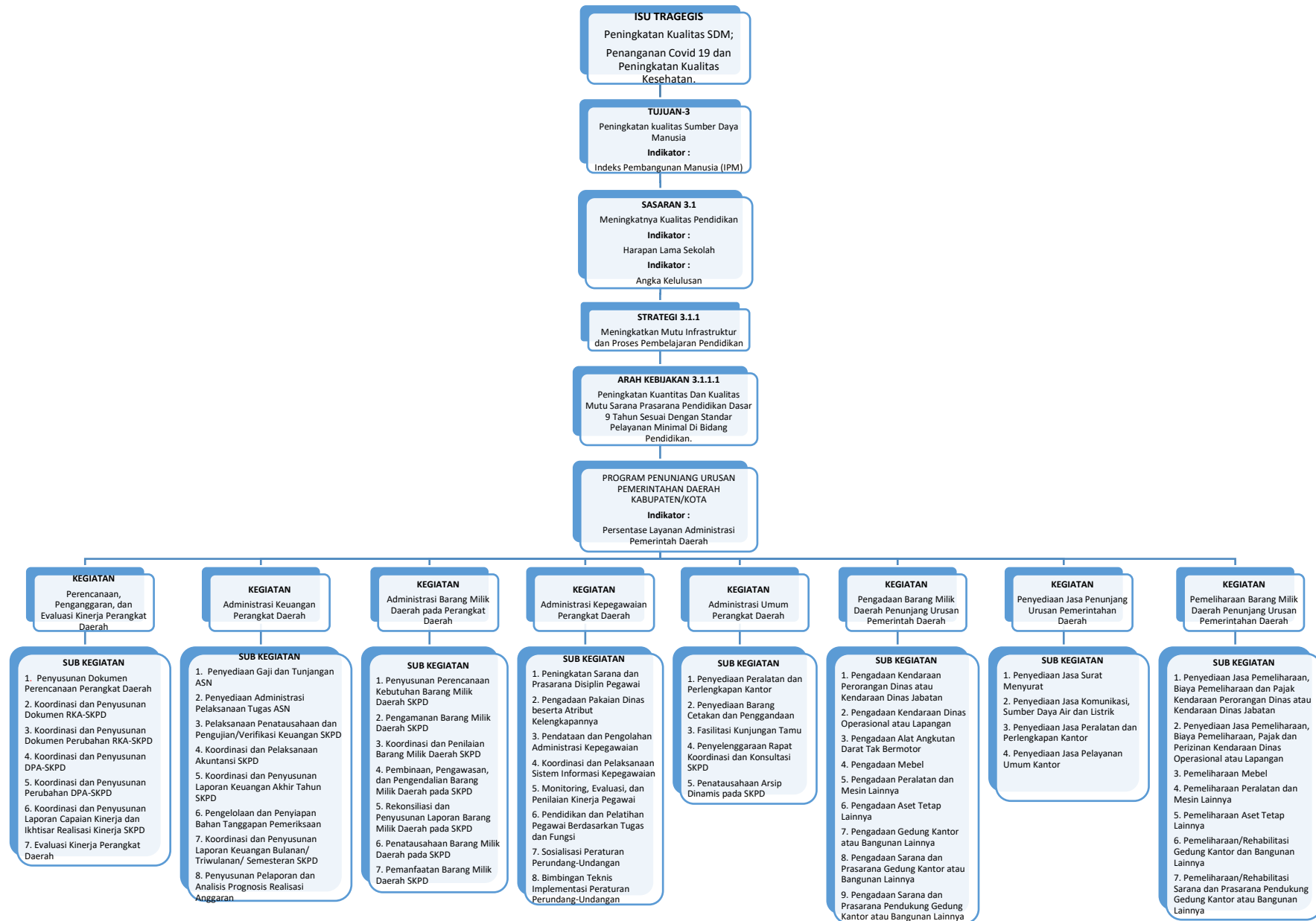
2.4 POHON KINERJA

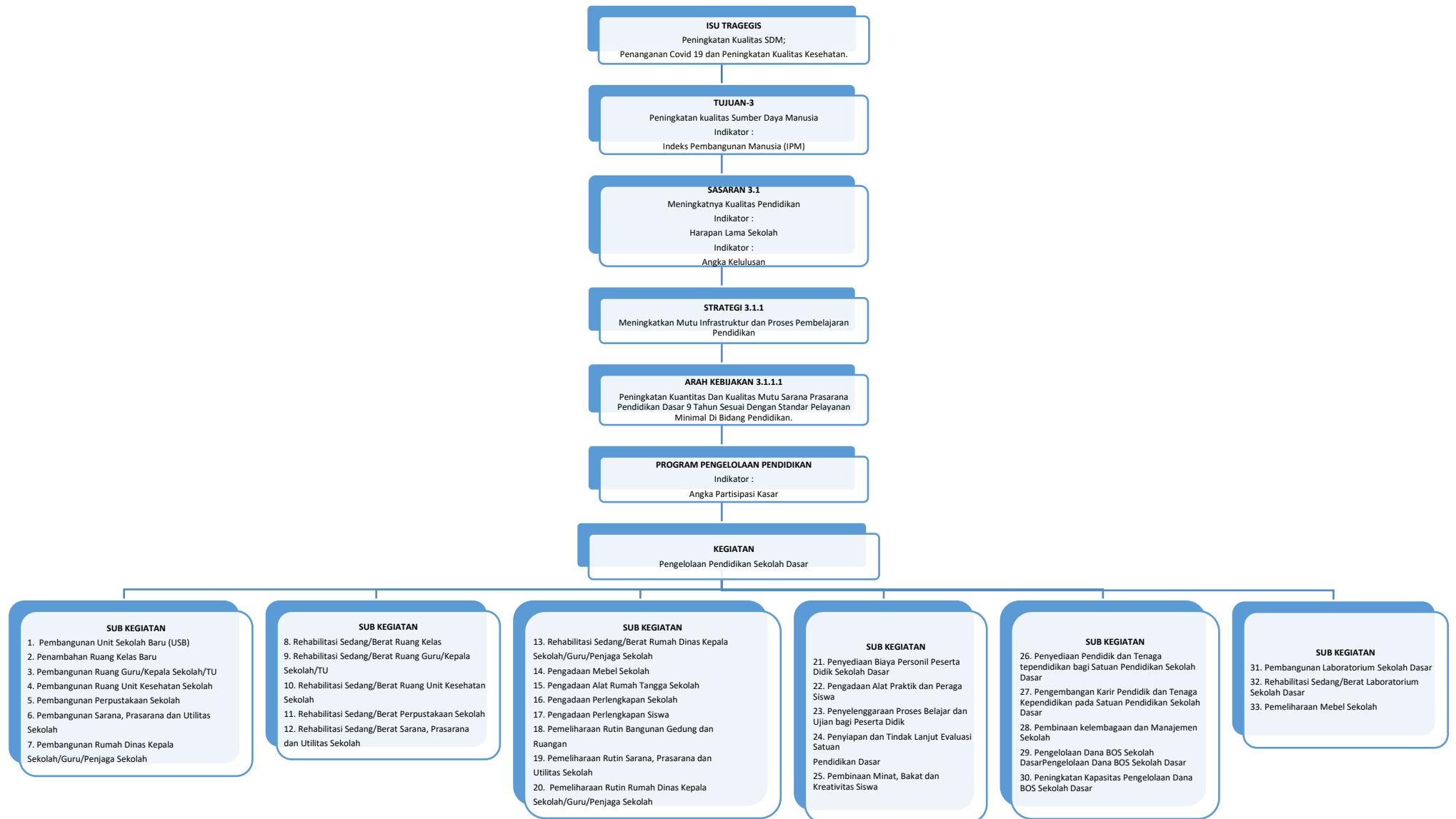
Pohon kinerja (*Cascading*) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:

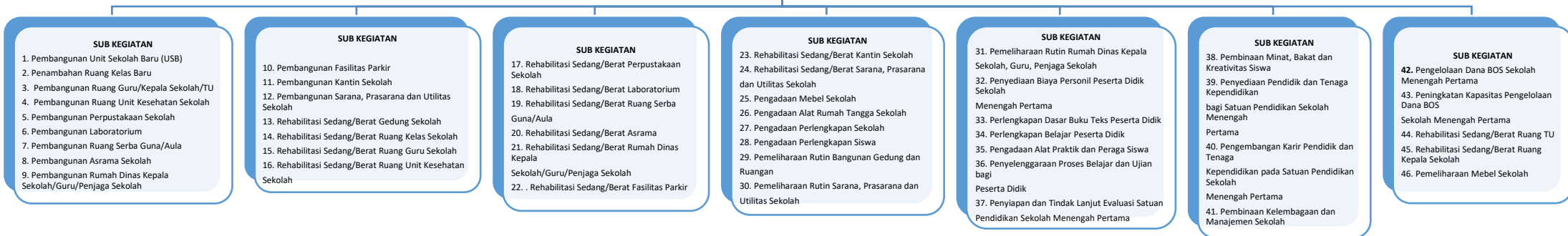
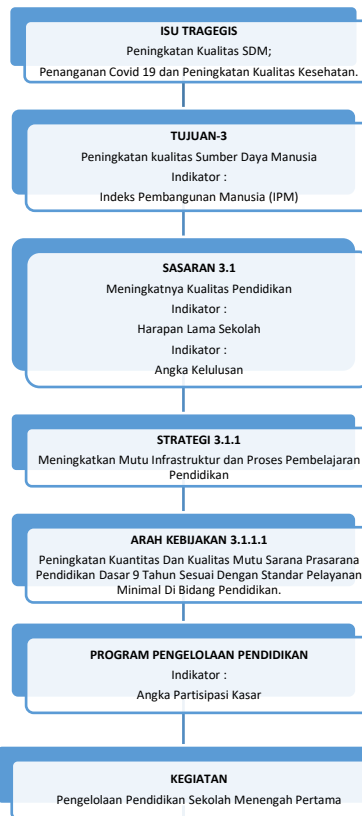
Gambar 2.1
Cascading Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe

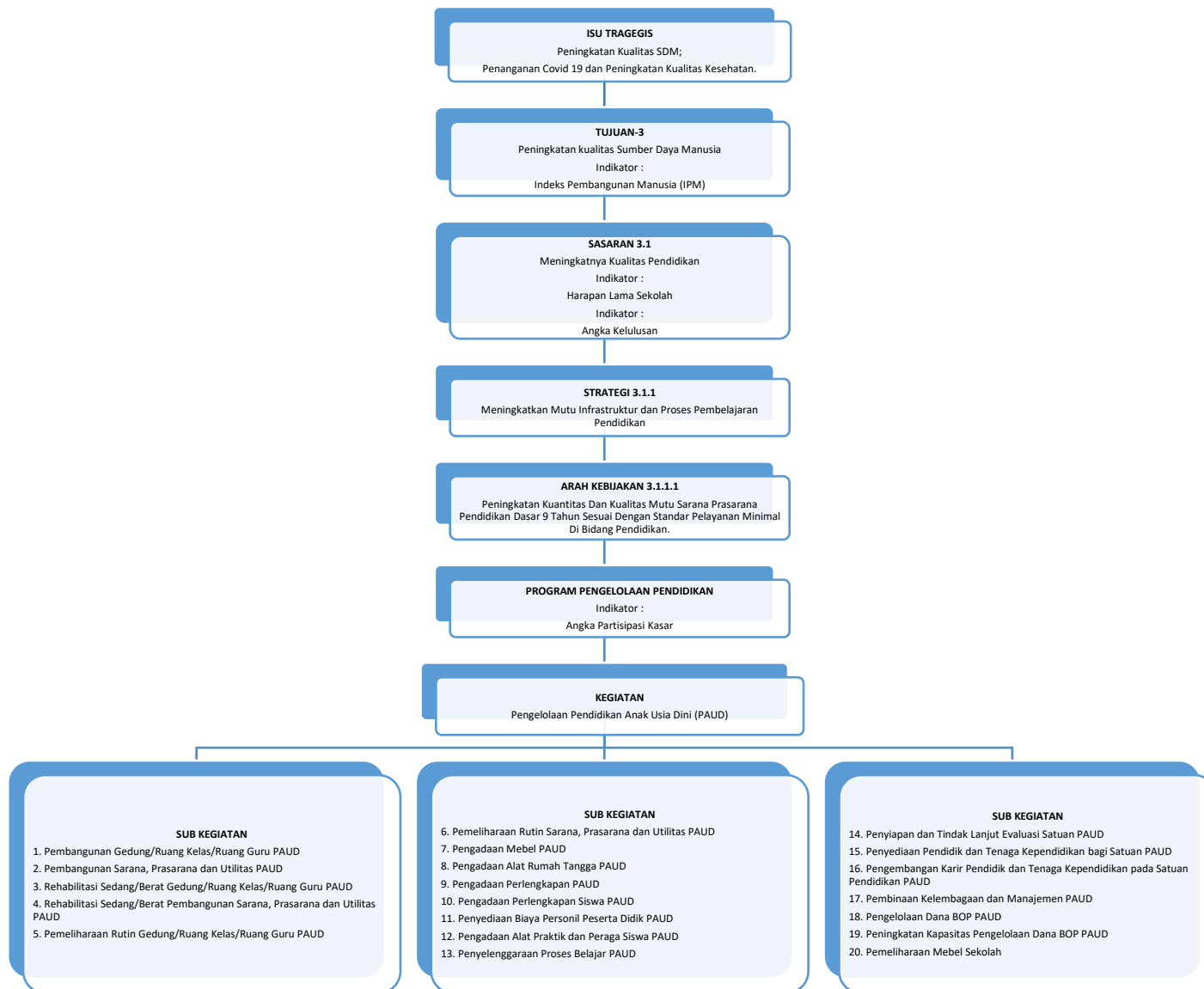


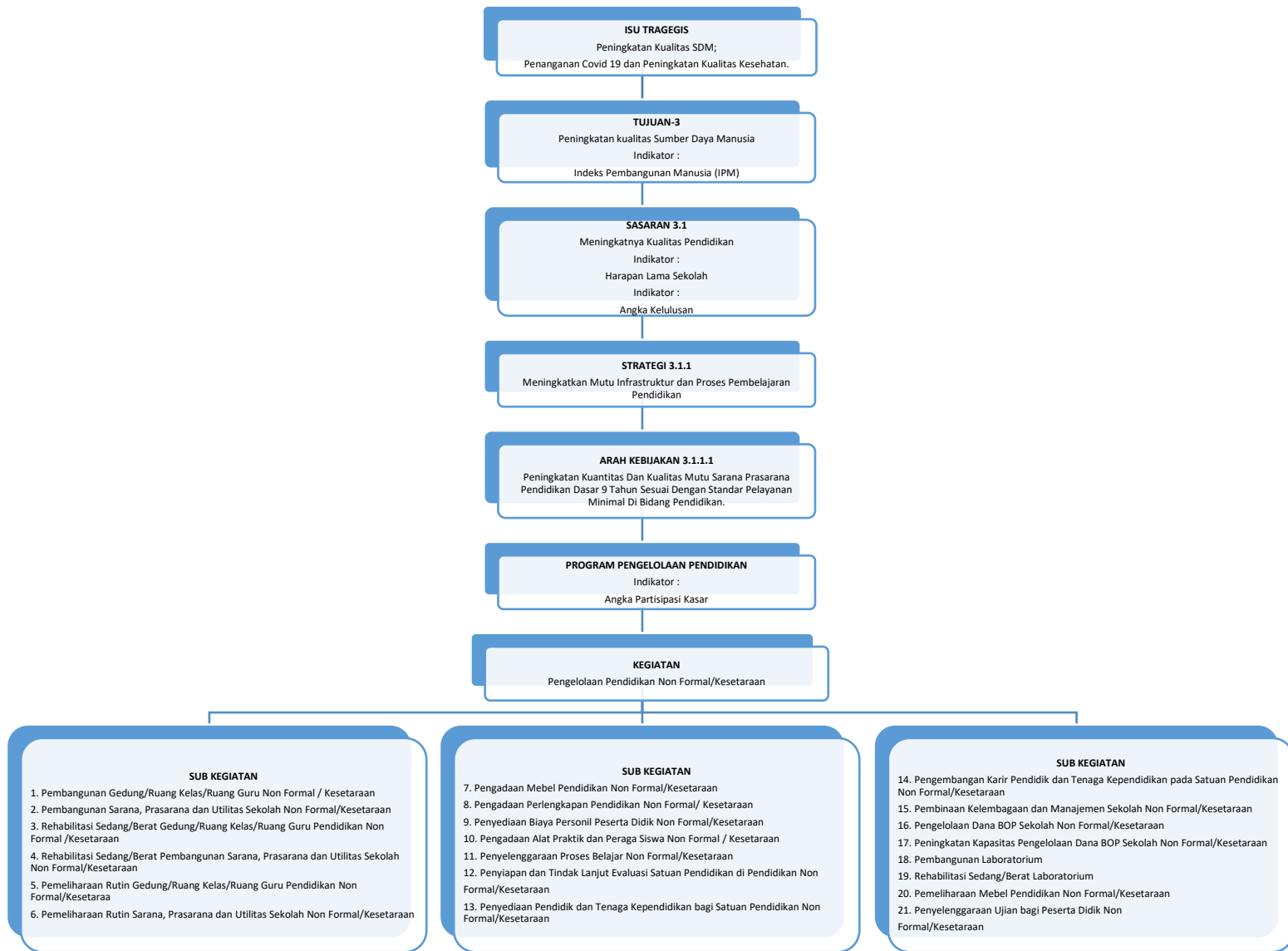


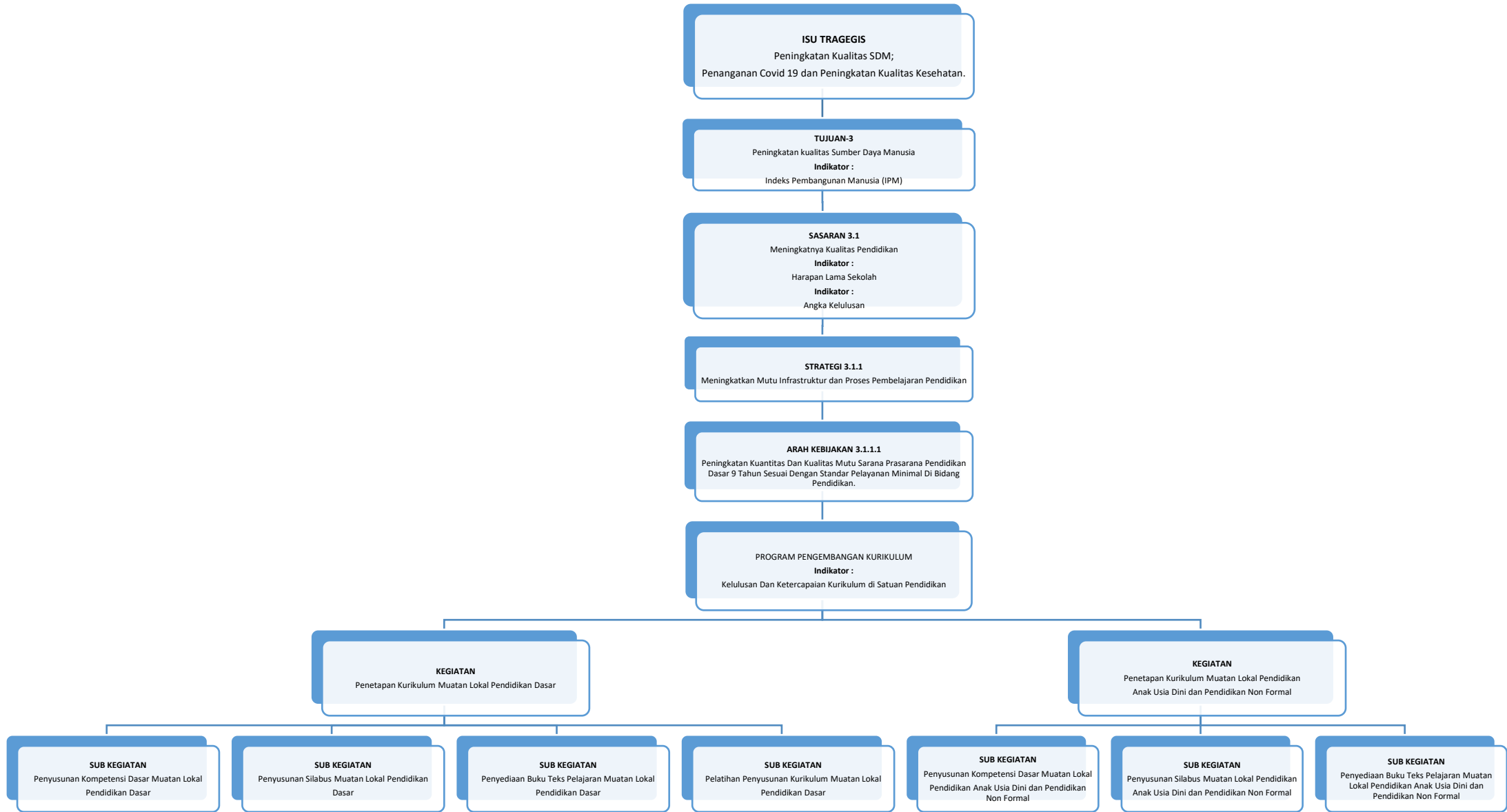


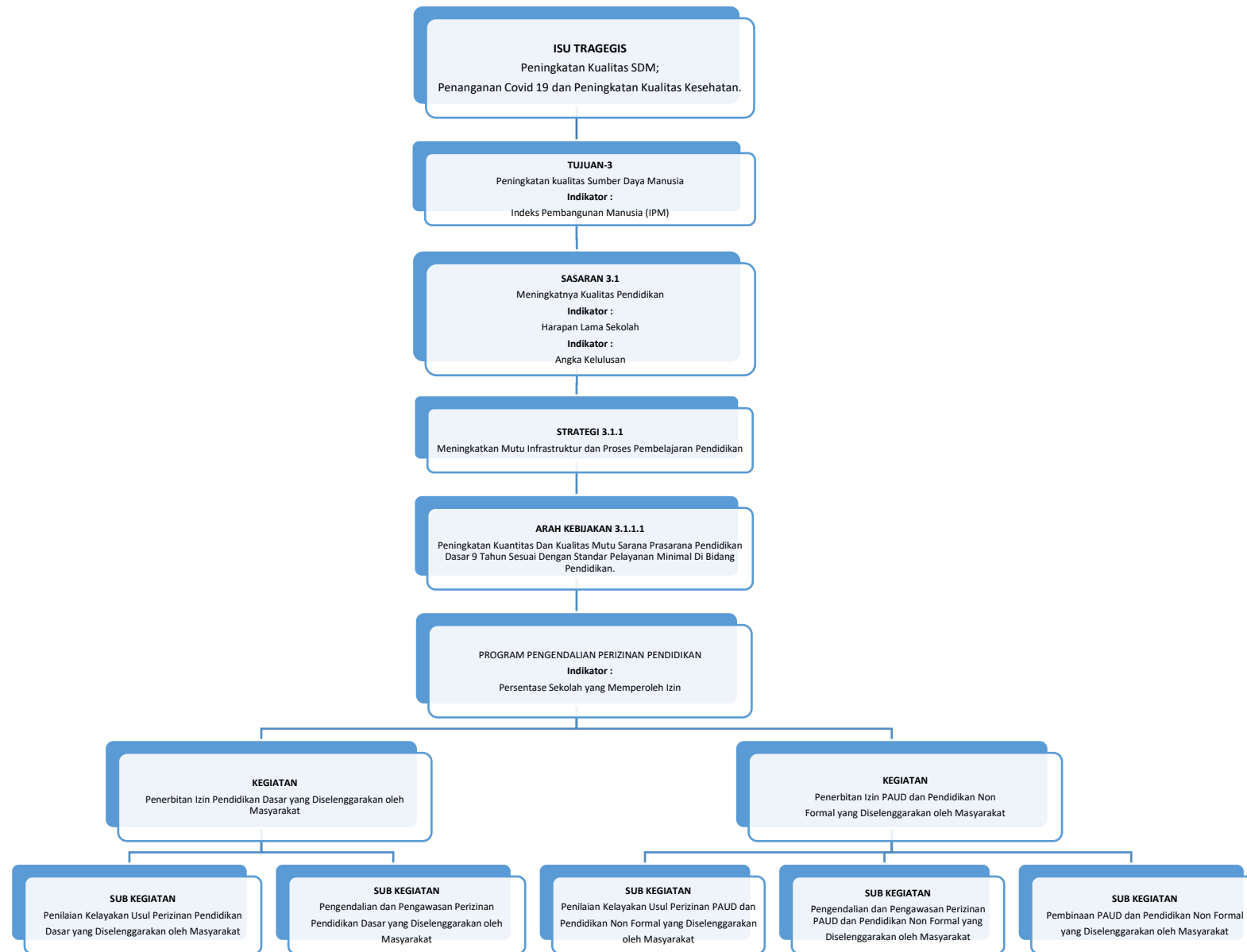


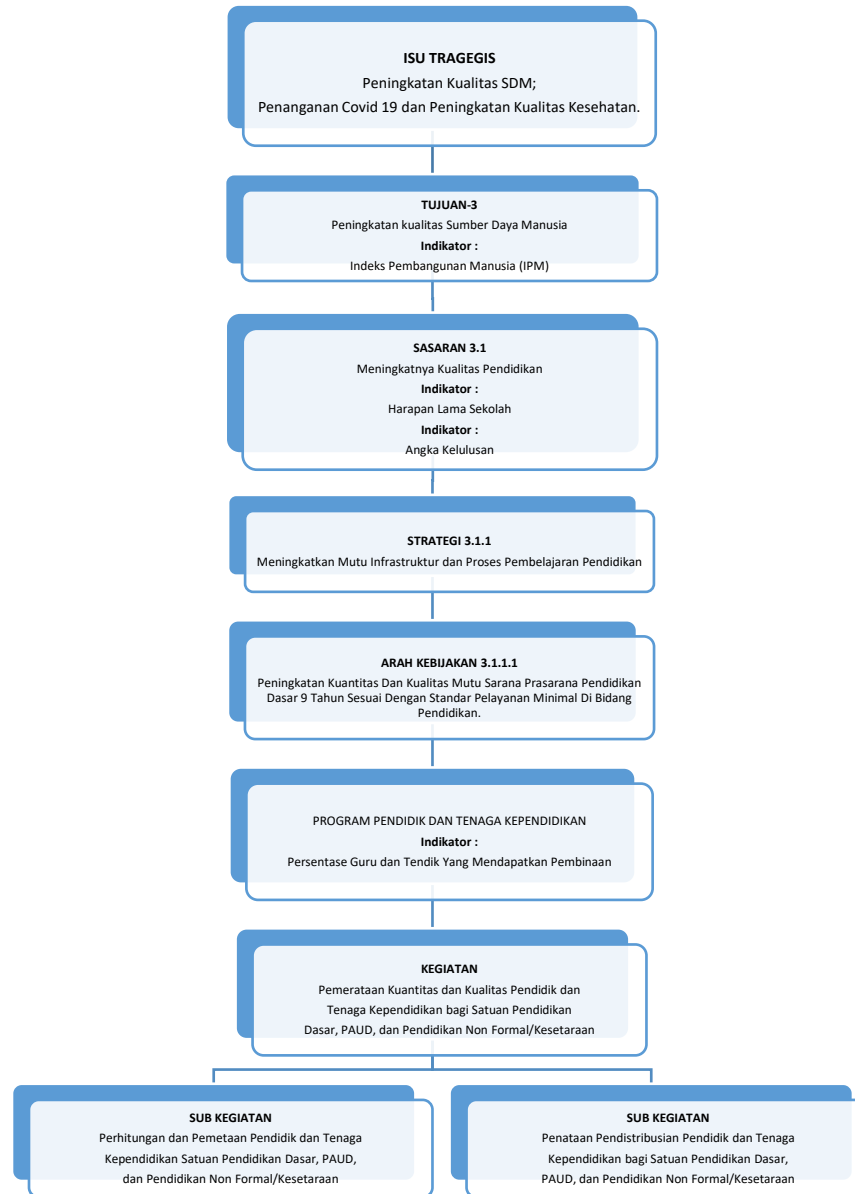












BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:




$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$






Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Potret kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe tercermin dari capaian 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang diukur untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe selama Tahun 2025.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe telah menetapkan 8 (delapan) IKU, dan hasil pengukuran atas IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja:

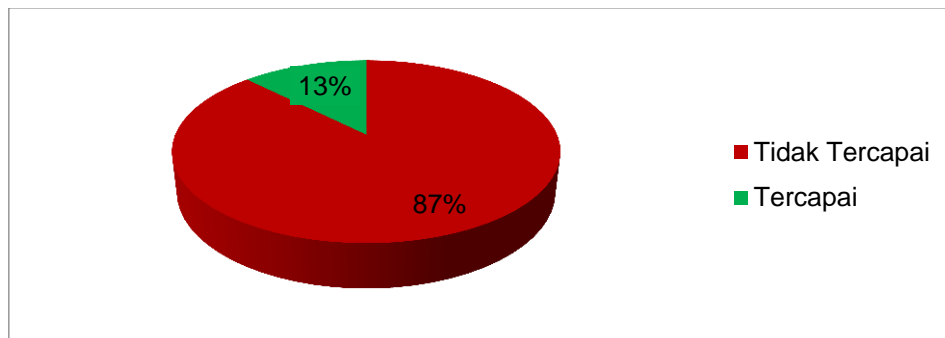
Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
1	Angka Kelulusan	Persen	100	100	Tercapai	
2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	100	99,49	Tidak Tercapai	
3	Angka Partisipasi Murni	Persen	100	87,65	Tidak Tercapai	
4	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	100	98,17	Tidak Tercapai	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal						
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	55	0	Tidak Tercapai	
6	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	Persen	76	27	Tidak Tercapai	
Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya						
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	57,67	4	Tidak Tercapai	
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						
8	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	55,56	Tidak Tercapai	
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2025						

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, hasil pengukuran capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal, menunjukkan hasil atas 8 (delapan) IKU yaitu sebanyak 1 IKU dengan predikat **Tercapai** dan 7 IKU dengan predikat

Tidak Tercapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025



Berdasarkan Diagram 3.1 diatas, hasil pengukuran atas capaian 8 (delapan) IKU menunjukkan hasil sebesar **13%** atau 1 IKU **Tercapai** dan **87%** atau 7 IKU **Tidak Tercapai**.

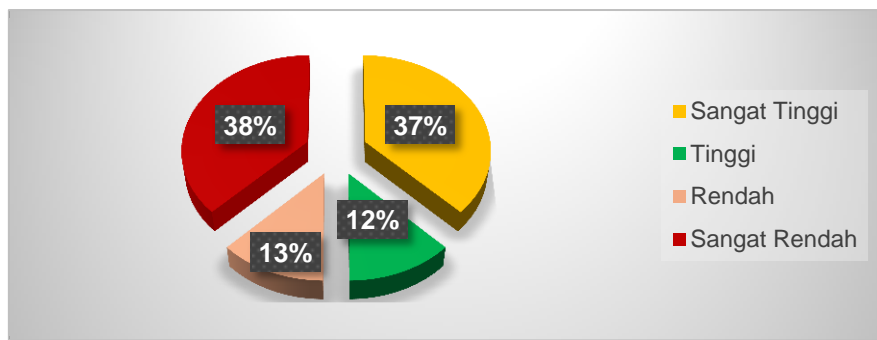
Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
1	Angka Kelulusan	Persen	100	100	Sangat Tinggi	■
2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	100	99,49	Sangat Tinggi	■
3	Angka Partisipasi Murni	Persen	100	87,65	Tinggi	■
4	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	100	98,17	Sangat Tinggi	■
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal						
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	55	0	Sangat Rendah	■

6	Persentase Masyarakat Partisipasi terhadap Budaya Lokal	Persen	76	27	Sangat Rendah	
Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya						
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	57,67	4	Sangat Rendah	
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						
8	Rata-rata Pencapaian pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100	55,56	Rendah	
Capaian IKU Tahun 2025 (%)				64,48	Rendah	
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2025						

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil bervariasi yaitu, sebanyak 3 IKU dengan Kategori: Sangat Tinggi; 1 IKU dengan Kategori: Tinggi; 1 IKU dengan Kategori: Rendah; dan 3 IKU dengan Kategori: Sangat Rendah. Artinya capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 berdasarkan Kategori Kinerja adalah 64,48 (Rendah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram 3.2 berikut ini:

Diagram 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025



Berdasarkan Diagram 3.2 diatas, hasil pengukuran berdasarkan kategori kinerja atas capaian 8 (delapan) IKU menunjukkan hasil sebesar **37%** atau 3 IKU dengan kategori **Sangat Tinggi, 12% atau** 1 IKU dengan kategori **Tinggi, 13%** atau 1 IKU dengan kategori **Rendah** dan **38%** atau 3 IKU dengan capaian kategori **Sangat Rendah**.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:

<p>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan</p>	<p>IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kelulusan 2. Angka Partisipasi Kasar 3. Angka Partisipasi Murni 4. Angka Partisipasi Sekolah
--	---

1. ANGKA KELULUSAN

Angka kelulusan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada tiap jenjang pendidikan pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi bagi sekolah yang bersangkutan.

Angka Kelulusan adalah proporsi antara lulusan pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang sekolah pada awal tahun ajaran, dinyatakan dalam satuan persen. Lulusan adalah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang sekolah yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.

Nilai Angka Kelulusan berkisar antara 0-100. Semakin tinggi Angka Kelulusan berarti semakin banyak lulusan pada akhir tahun ajaran tertentu terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada awal tahun ajaran tersebut. Jika angka kelulusan sebesar 100 persen artinya seluruh peserta didik tingkat tertinggi pada awal tahun ajaran tertentu telah memenuhi standar kompetensi lulusan dan dinyatakan lulus pada akhir tahun ajaran tersebut.

Dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan 3 (tiga) aspek yang menentukan apakah siswa dinyatakan lulusan dari satuan pendidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelesaikan program pembelajaran dibuktikan dengan rapor tiap semester.
2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik.
3. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Berikut beberapa faktor penyebab keberhasilan angka kelulusan Pendidikan Dasar:

- Faktor Internal, meliputi: Kualitas Guru, Kurikulum yang Relevan, Penggunaan Teknologi, dan Kondisi Sekolah
- Faktor Eksternal, meliputi: Dukungan Orang Tua, Lingkungan Belajar, Ketersediaan Sumber Daya, dan Kebijakan Pemerintah
- Faktor Siswa, meliputi: Motivasi Belajar, Kemampuan Belajar, Kedisiplinan, dan Kesehatan.

Tabel 3.5
Nilai Hasil Angka Kelulusan SD dan SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2025

Tahun	Target	Capaian (%)	
		SD	SMP
2023	100	100	100
2024	100	100	100
2025	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Angka Kelulusan adalah sebagai berikut:

- ***Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.***
 Realisasi kinerja atas IKU: Angka Kelulusan pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 100%. Nilai ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **100% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Mencapai Target)**.
- ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***
 Angka Kelulusan dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren datar/stabil. Pada Tahun 2024, nilai persentase tercatat sebesar 100%, sedangkan pada Tahun 2025 tetap dengan capaian 100%.

- ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***

Realisasi kinerja atas IKU: Angka Kelulusan pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, untuk mencapai target akhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus berkontribusi lebih baik agar dapat mempertahankan capaian seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

- ***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Realisasi kinerja Angka Kelulusan Tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Solusi yang akan dilakukan ke depan adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan secara lebih sistematis serta mendorong pemenuhan target evaluasi kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- ***Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.***

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Sekolah Dasar

- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 60.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau capaian kinerja anggaran sebesar **0%**.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar sebesar Rp. 135.522.000 dan terealisasi sebesar Rp. 135.522.000 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,69%**.

- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Sekolah Dasar sebesar Rp. 9.890.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.989.900 atau capaian kinerja anggaran sebesar **90,90%**.

Sekolah Menengah Pertama

- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 70.708.360 dan terealisasi sebesar Rp. 33.608.037 atau capaian kinerja anggaran sebesar **47,53%**.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 17.160.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.079.200 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,53%**.
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 6.572.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.671.845 atau capaian kinerja anggaran sebesar **86,30%**.

2. ANGKA PARTISIPASI KASAR

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, misalnya dengan menambah

fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Data yang diperlukan untuk menghitung APK adalah sebagai berikut:

- Data jumlah penduduk yang pada tahun t sedang sekolah (atau menjadi siswa) dari berbagai usia, pada setiap jenjang pendidikan.
- Data jumlah penduduk per kelompok usia standar (lihat tabel usia standar) yang berkaitan dengan setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memperoleh nilai Angka Partisipasi Kasar SD sebesar 101,21% (melebihi target) dan untuk jenjang SMP sebesar 97,76% (tidak mencapai target).

Tabel 3.6
Nilai Hasil Angka Partisipasi Kasar SD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2025

Tahun	Target	Capaian
2023	100	107,71
2024	100	110,14
2025	100	101,21

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Tabel 3.7
Nilai Hasil Angka Partisipasi Kasar SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2025

Tahun	Target	Capaian
2023	100	97,44
2024	100	90,51
2025	100	97,76

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Angka Partisipasi Kasar adalah sebagai berikut:

▪ ***Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.***

Realisasi kinerja atas IKU: Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 99,49%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **99,49% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Belum Mencapai Target).**

▪ ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***

Angka Partisipasi Kasar dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, nilai persentase tercatat sebesar 100,325%, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 99,49%, sehingga terjadi penurunan sebesar 0,835 poin.

▪ ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***

Realisasi kinerja atas IKU: Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2025 adalah sebesar 99,49%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 0,51% lagi.

▪ ***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Tercapainya Angka Partisipasi Kasar jenjang SD disebabkan oleh ketersediaan jumlah ruang kelas yang layak pakai, ketersediaan guru yang berkualifikasi, kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah sekolah terakreditasi, serta pengembangan program pendidikan yang relevan dan efektif. Sedangkan tidak tercapainya

Angka Partisipasi Kasar jenjang SMP disebabkan karena minat dari orang tua/peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke Pendidikan Dayah atau Madrasah Tsanawiyah. Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Kasar Tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Solusi yang akan dilakukan ke depan adalah meningkatkan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan secara lebih sistematis serta mendorong pemenuhan target evaluasi kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

▪ ***Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.***

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Sekolah Dasar

- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebesar Rp. 576.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 573.135.864 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,50%**.
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp. 168.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 167.640.182 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,49%**.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp. 4.291.830.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.248.399.524 atau capaian kinerja anggaran sebesar **98,99%**.

Sekolah Menengah Pertama

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp. 1.822.823.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.818.113.667 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,74%**.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp. 320.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 319.888.169 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,97%**.

3. ANGKA PARTISIPASI MURNI

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Data yang diperlukan untuk menghitung APM adalah sebagai berikut:

- Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang masih bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.
- Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang standar (contoh: kelompok usia SD=7-12 tahun, SMP=13-15 tahun, SMA=16-18 tahun, dst)

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memperoleh nilai Angka Partisipasi Murni SD sebesar 93,72% dan untuk jenjang SMP sebesar 81,57%. Hasil tersebut menggambarkan pencapaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8
Nilai Hasil Angka Partisipasi Murni SD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2025

Tahun	Target	Capaian
2023	100	99,73
2024	100	98,79
2025	100	93,72

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Tabel 3.9
Nilai Hasil Angka Partisipasi Murni SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2025

Tahun	Target	Capaian
2023	100	89,43
2024	100	86,46
2025	100	81,57

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Angka Partisipasi Murni adalah sebagai berikut:

- ***Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.***
 Realisasi kinerja atas IKU: Angka Partisipasi Murni pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 87,65%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **87,65% (Kategori Kinerja: Tinggi; Predikat Kinerja: Belum Mencapai Target)**.
- ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***
 Angka Partisipasi Murni dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, nilai persentase tercatat sebesar 92,63%, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 87,65%, sehingga terjadi penurunan sebesar 4,98 poin.

- ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***

Realisasi kinerja atas IKU: Angka Partisipasi Murni pada tahun 2025 adalah sebesar 87,65%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 12,35% lagi.

- ***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Faktor penyebab belum tercapainya target Indikator Kinerja Utama dalam Angka Partisipasi Murni meliputi kesadaran orang tua tentang pentingnya Pendidikan, serta faktor geografis seperti pembangunan fasilitas sekolah di daerah terpencil untuk meningkatkan akses ke Pendidikan, dan mengembangkan program pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan akses ke pendidikan.

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni Tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Solusi yang akan dilakukan ke depan adalah meningkatkan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan secara lebih sistematis serta mendorong pemenuhan target evaluasi kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- ***Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.***

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Sekolah Dasar

- Pengadaan Mebel Sekolah sebesar Rp. 4.100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.028.118.418 atau capaian kinerja anggaran sebesar **98,25%**.

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp. 3.141.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.890.097.832 atau capaian kinerja anggaran sebesar **91,99%**.
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik sebesar Rp. 285.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 284.042.445 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,66%**.
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebesar Rp. 464.449.000 dan terealisasi sebesar Rp. 462.132.140 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,50%**.

Sekolah Menengah Pertama

- Pengadaan Mebel Sekolah sebesar Rp. 1.405.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.382.405.833 atau capaian kinerja anggaran sebesar **98,39%**.
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 1.238.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.121.390.788 atau capaian kinerja anggaran sebesar **90,58%**.
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebesar Rp. 217.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 216.894.960 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,95%**.

4. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut juga memperhitungkan terjadinya perubahan penduduk, terutama penduduk usia muda. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SMP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. APS sebagai indikasi bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah. Jadi semakin tinggi angka partisipasi sekolah, dapat diartikan semakin baik infrastruktur yang tersedia, dan semakin baik pula akses penduduk terhadap pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memperoleh nilai Angka Partisipasi Sekolah SD sebesar 99,77% dan untuk jenjang SMP sebesar 96,56%. Hasil tersebut menggambarkan pencapaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.10
Nilai Hasil Angka Partisipasi Sekolah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2025

Tahun	Target	Capaian	
		SD	SMP
2023	100	99,89	99,36
2024	100	99,97	96,37
2025	100	99,77	96,56

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Angka Partisipasi Sekolah adalah sebagai berikut:

- ***Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.***

Realisasi kinerja atas IKU: Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 98,17%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **98,17% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Belum Mencapai Target).**

- ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***

Angka Partisipasi Sekolah dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren datar/stabil. Pada tahun 2024, nilai persentase tercatat sebesar 98,17%, sedangkan pada tahun 2025 tetap dengan capaian 98,17%.

- ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***

Realisasi kinerja atas IKU: Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2025 adalah sebesar 98,17%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 1,83% lagi.

- ***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Faktor penyebab belum tercapainya Angka Partisipasi Sekolah dikarenakan beberapa hal, seperti Mutu dan Relevansi Hasil Belajar, Pemerataan Pendidikan yang Bermutu, Kompetensi dan Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan, Mutu dan Relevansi Pembelajaran, serta Pengelolaan Sekolah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Solusi yang akan dilakukan ke depan adalah meningkatkan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan secara lebih sistematis serta mendorong pemenuhan target evaluasi kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

▪ ***Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.***

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Sekolah Dasar

- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebesar Rp. 576.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 573.135.864 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,50%**.
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp. 168.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 167.640.182 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,49%**.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp. 4.291.830.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.248.399.524 atau capaian kinerja anggaran sebesar **98,99%**.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp. 95.680.000 dan terealisasi sebesar Rp. 95.679.736 atau capaian kinerja anggaran sebesar **100%**.
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp. 17.789.540.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.789.540.000 atau capaian kinerja anggaran sebesar **100%**.
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp. 3.102.940 dan terealisasi sebesar Rp. 2.674.640 atau capaian kinerja anggaran sebesar **86,20%**.

Sekolah Menengah Pertama

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp. 1.822.823.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.818.113.667 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,74%**.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp. 320.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 319.888.169 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,97%**.

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp. 98.380.000 dan terealisasi sebesar Rp. 97.769.442 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,38%**.
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar
- Rp. 9.270.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.270.050.000 atau capaian kinerja anggaran sebesar **100%**.
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 3.084.940 dan terealisasi sebesar Rp. 2.569.700 atau capaian kinerja anggaran sebesar **83,30%**.

Solusi dan strategi yang akan dilakukan dalam memaksimalkan pencapaian IKU sektor Pendidikan adalah :

- a. Pelayanan pendidikan harus ditopang oleh pelaku pendidikan yang berada di front terdepan yaitu peran kepala sekolah, guru dan pegawai melalui interaksinya dalam pendidikan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada rencana strategis. Keterlibatan seluruh komponen pendidikan (guru, kepala sekolah, masyarakat, komite sekolah, dewan pendidikan dan intitusi) dalam perencanaan dan realisasi program pendidikan yang diluncurkan sangat dibutuhkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan.
- b. Implementasi kemampuan profesional kepala sekolah mutlak diperlukan sejalan diberlakukannya otonomi daerah, khususnya bidang pendidikan. Kemampuan profesional kepala sekolah akan terwujud apabila memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam mengelola interaksi belajar mengajar pada tatanan mikro, dan memiliki kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro.
- c. Salah satu upaya profesional kepala sekolah adalah melalui motivasi komunikasi dan kepemimpinan yang baik dengan pegawai serta guru akan membawa dampak bagi perkembangan sekolah kearah kemajuan. Dengan motivasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah

yang diterapkan bertujuan memberikan pembinaan kepada guru dan pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

- d. Dalam pelaksanaannya baik kepala sekolah, guru, dan pegawai haruslah bias menciptakan suasana yang harmonis dan kekeluargaan, untuk memberikan efek positif dan kebersamaan dilingkungan sekolah yang mengarah ke peningkatan kinerja yang sesuai dengan harapan. Mewujudkan kondisi ideal dimana kemampuan profesional kepala sekolah dapat diimplementasikan melalui hubungan komunikasi serta gaya kepemimpinan kepala sekolah tergantung pada berbagai komponen sistem pendidikan yang saling berkolaborasi.
- e. Oleh karena itu keterkaitan berbagai komponen pendidikan sangat menentukan implementasi kemampuan kepala sekolah agar mampu mengelola suasana yang nyaman kondusif dengan para guru dan pegawai sehingga terciptanya semangat untuk bekerja yang mengarah ke peningkatan kinerja, maka dari pada itu motivasi komunikasi serta kepemimpinan yang diterapkan oleh para kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya sekolah, atas dasar inilah analisis sumber daya pendidikan melalui tahapan-tahapan pembinaan, pelatihan dan pendidikan terhadap pelaku kegiatan analisis sumber daya pendidikan bisa terwujud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal berdasarkan Nilai-nilai syariat islam

IKU:

5. Persentase budaya lokal yang dilestarikan
6. Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal

5. PERSENTASE BUDAYA LOKAL YANG DILESTARIKAN

Dalam konteks era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Arus globalisasi membawa masuknya budaya dan praktik dari luar negeri yang semakin mempengaruhi generasi muda. Media, film, musik, dan internet menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan budaya luar yang seringkali mendominasi dunia digital.

Dampaknya, kebudayaan daerah menjadi terpinggirkan dan semakin dilupakan oleh generasi muda. Banyak anak-anak muda lebih mengenal dan mengikuti budaya luar daripada menghargai dan melestarikan budaya daerah mereka sendiri.

Ada begitu banyak cara untuk menjaga budaya lokal agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Namun yang terpenting adalah para generasi muda harus punya rasa cinta terhadap budaya lokal nusantara. Dengan adanya rasa cinta, maka akan timbul sikap untuk menjaga kebudayaan tersebut. Globalisasi adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa saat ini dalam hal melestarikan budaya lokal nusantara. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga kebudayaan itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap leluhur.

Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan didapat dengan membagi jumlah budaya lokal yang tersedia dengan jumlah budaya lokal yang dilestarikan. Situs cagar budaya yang terdata dan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Lhokseumawe mengalami perubahan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Situs Cagar Budaya yang terdata	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Target	Capaian (%)
2023	22	11	50	50
2024	25	13	50	52
2025	25	0	57,67	0

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2025

Berikut daftar cagar budaya yang terdata di Kota Lhokseumawe:

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Register	Surat Keputusan Walikota
1	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	Gampong Mon Geudong Kec. Banda Sakti	Bangunan Cagar Budaya	11.73.U.05.0334	-
2	Gua Jepang	Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu	Struktur Cagar Budaya	-	-
3	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu	Bangunan Cagar Budaya	-	-
4	Makam Tgk. Chik Ditunong	Makam : Gampong Mongedong	Bangunan Cagar Budaya	-	-
5	Tiang Gantungan Chik Ditunong	Tiang : Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti	Struktur Cagar Budaya	-	-
6	Kawasan Bunker (Kurok-rok) Tentara Jepang	Gampong Hagu	Kawasan Cagar Budaya	-	-
7	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti	Bangunan Cagar Budaya	-	-
8	Makam Putroe Neng	Blang Pulo Kecamatan Muara Satu	Bangunan Cagar Budaya	-	-
9	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Gampong Banda Masen Kec. Banda Sakti	Bangunan Cagar Budaya	-	-
10	Makam Tgk. Ulei Utan	Gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti	Bangunan Cagar Budaya	-	-
11	Makam Syaikh Al-Kalaliy	Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti	Bangunan Cagar Budaya	-	-

12	Tugu Perlawanan TKR melawan Tentara Jepang	Keude Cunda, Kec. Muara Dua	Bangunan Cagar Budaya	CB.6060.19700101.00005	-
13	Makam Tgk. Jrad Meuindram	Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu	Bangunan Cagar Budaya	-	-
14	Makam Tgk. Syiah Hudam	Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu	Bangunan Cagar Budaya	CB.6060.19700101.00004	-
15	Makam Mualim Ahmad Taufiq	Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat	Bangunan Cagar Budaya	-	-
16	Makam Teuku Maharaja Abdul Hamid	Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti	Bangunan Cagar Budaya	-	-
17	Meriam Teuku Maharaja Abdul Hamid	Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti	Benda Cagar Budaya	-	-
18	Tugu Lokasi Syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gampong Blang Buloh Kec. Blang Mangat	Bangunan Cagar Budaya	-	-
19	Makam Prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gampong Blang Buloh Kec. Blang Mangat	Bangunan Cagar Budaya	-	-
20	Tugu Pertempuran Antara TNI melawan Tentara Laut dan Udara Belanda	Hagu Selatan Kecamatan Bada Sakti	Bangunan Cagar Budaya	-	-
21	Kawasan Goa Ibrahim Tapa dan Cot Bukulah	Gampong Panggoi Kecamatan Muara Satu	Kawasan Cagar Budaya	-	-
22	Rumoh Adat Ulee Balang Kuta Kareung	Gampong Mns. Mesjid Kec. Muara Dua	Bangunan Cagar Budaya	-	-
23	Makam Tgk. Batee Meutarah	Jeulikat Kecamatan Blang Mangat	Bangunan Cagar Budaya	-	-
24	Mon Tujuh	Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe	Bangunan Cagar Budaya	-	-
25	Islamic Centre dan Mesjid	Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Bangunan Cagar Budaya	-	-

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan adalah sebagai berikut:

▪ ***Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.***

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 0%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 57,67%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **0% (Kategori Kinerja: Sangat Rendah; Predikat Kinerja: Belum Mencapai Target).**

▪ ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***

Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan dalam dua tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2024, nilai persentase tercatat sebesar 52%, sedangkan pada tahun 2025 menurun dengan capaian 0% dikarenakan adanya perubahan peraturan.

▪ ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan pada tahun 2025 adalah sebesar 0%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 57,67%. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 57,67% lagi.

▪ ***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Faktor penyebab belum tercapainya Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan pada Tahun 2025, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap cagar budaya yang dilestarikan harus memiliki SK Wali Kota.

Realisasi kinerja Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan Tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Solusi yang akan dilakukan ke depan adalah membangun kerja sama dan jaringan dengan organisasi lain, kepemimpinan dan pengelolaan yang efektif, serta mendorong pemenuhan target evaluasi kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

▪ ***Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.***

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengembangan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan total anggaran sebesar Rp. 321.944.384 dan terealisasi sebesar Rp. 307.077.354 atau capaian kinerja anggaran sebesar **95,38%**.
- Pelindungan Cagar Budaya dengan total anggaran Rp. 15.361.414 dan terealisasi sebesar Rp. 14.545.926 atau capaian kinerja anggaran sebesar **94,69%**.

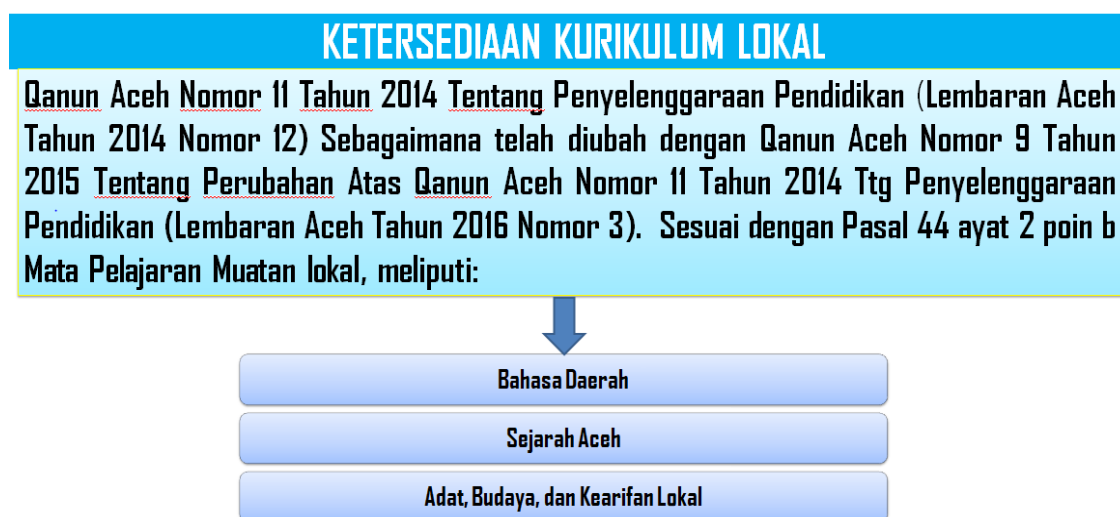
6. PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP BUDAYA LOKAL

Sebagai benteng utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan, lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam melestarikan kebudayaan daerah. Sekolah, sebagai institusi pendidikan utama, harus mampu membentuk dan membimbing para siswa untuk mengenali, menghargai, dan melestarikan kebudayaan daerah mereka.

Pertama, integrasi kurikulum yang memasukkan pembelajaran tentang kebudayaan daerah menjadi langkah penting untuk menghidupkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan budaya lokal. Materi pembelajaran mengenai sejarah, seni, bahasa, dan adat istiadat daerah setempat harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Dengan

demikian, para siswa akan memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan tentang kebudayaan daerah tempat mereka tinggal.

Dengan mengintegrasikan pembelajaran tentang kebudayaan daerah ke dalam kurikulum dan melibatkan para siswa dalam berbagai kegiatan yang mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap budaya lokal, kita dapat menjaga dan menghormati warisan budaya ini demi masa depan yang kokoh dan berwawasan budaya. Semoga generasi muda yang mencintai dan melestarikan kebudayaan daerah akan terus membawa kekayaan kultural ini meresap hingga ke generasi mendatang dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe

Kedua, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pentas seni, pameran budaya, atau kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di daerah setempat adalah cara efektif untuk membuka ruang bagi para siswa untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan apresiasi terhadap kebudayaan daerah. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, para siswa dapat mengeksplorasi kreativitas mereka melalui seni, musik, tari, dan tradisi lokal. Berikut daftar penyelenggaraan kegiatan Museum Kota Lhokseumawe yang melibatkan Masyarakat:

No	Nama Kegiatan	
	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Workshop Rapai Uroeh

	Tradisi Budaya (Workshop Seni dan BUdaya di Era Dlgitalisasi)	
2.	Festival Kultural dan Kesenian Daerah	Workshop Pagelaran Seni Rapai
3.	Pelatihan Hikayat dan Seumapa	Pameran Temporer (Koleksi Museum)
4.	Bimbingan Teknis Konservasi Koleksi Museum	Festival Kultural Museum
5.	Belajar Bersama Canang Ceureukeh	Seminar Alat Musik Canang Ceurekeuh
6.	Kajian Rapai Uroeh	Belajar Bersama Seni Tutur Aceh/Hikayat
7.		Pendataan Cagar Budaya
8.		Workshop Konservasi Koleksi Museum
9.		Pelatihan Seudati Antar Gampong Kecamatan Muara Dua

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2025

Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal didapat dengan membagi Jumlah Masyarakat Kota Lhokseumawe dengan Jumlah Partisipan yang berkunjung ke museum. Dengan bertambahnya penyelenggaraan kegiatan budaya lokal di museum Kota Lhokseumawe, hal ini berpengaruh signifikan terhadap Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal sebagai berikut:

Tahun	Target	Capaian
2023	75	7,8
2024	75	13,76
2025	76	27

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal adalah sebagai berikut:

▪ ***Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.***

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal pada Tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 27%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **27% (Kategori Kinerja: Sangat Rendah; Predikat Kinerja: Belum Mencapai Target).**

▪ ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***

Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal dalam dua tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2024, nilai persentase tercatat sebesar 13,76%, sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dengan capaian 27.

▪ ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal pada Tahun 2025 adalah sebesar 27%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 76%. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 49% lagi.

▪ ***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Faktor penyebab belum tercapainya Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal pada Tahun 2025, hal ini dikarenakan terlalu

luas cakupan variabel pembilang pada perhitungan Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal.

Realisasi kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal Tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Solusi yang akan dilakukan ke depan adalah membangun kerja sama dan jaringan dengan organisasi lain untuk mengadakan event yang lebih menarik perhatian masyarakat.

▪ ***Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.***

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan total anggaran sebesar Rp. 122.250.000 dan terealisasi sebesar Rp. 107.499.726 atau capaian kinerja anggaran sebesar **87,93%**.
- Program Pengelolaan Permuseuman dengan total anggaran sebesar Rp. 598.407.000 dan terealisasi sebesar Rp. 562.865.806 atau capaian kinerja anggaran sebesar **94,06%**.

Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya	IKU: 7. Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
--	---

7. PERSENTASE PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

Pelestarian dan pengembangan budaya daerah merupakan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah. Berikut beberapa cara untuk melakukan pelestarian dan pengembangan budaya daerah:

Pelestarian Budaya Daerah

1. Dokumentasi Budaya: Mendokumentasikan budaya daerah melalui foto, video, dan tulisan untuk mempertahankan rekaman sejarah dan budaya.
2. Pengembangan Museum: Membangun museum untuk melestarikan dan memamerkan koleksi budaya daerah.
3. Pengajian Budaya: Mengadakan pengajian budaya untuk mempertahankan pengetahuan dan tradisi budaya daerah.
4. Pelestarian Situs Budaya: Melestarikan situs-situs budaya seperti candi, kuil, dan makam untuk mempertahankan warisan budaya.

Pengembangan Budaya Daerah

1. Pengembangan Seni: Mengembangkan seni daerah seperti musik, tari, dan teater untuk mempromosikan budaya daerah.
2. Pengembangan Kerajinan: Mengembangkan kerajinan daerah seperti tekstil, keramik, dan ukiran untuk mempromosikan budaya daerah.
3. Pengembangan Pariwisata: Mengembangkan pariwisata daerah untuk mempromosikan budaya daerah dan meningkatkan ekonomi lokal.
4. Pengembangan Pendidikan: Mengembangkan pendidikan budaya daerah untuk mempertahankan pengetahuan dan tradisi budaya daerah.

Manfaat Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

1. Mempertahankan Identitas: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah dapat mempertahankan identitas daerah dan membedakannya dari daerah lain.
2. Meningkatkan Ekonomi: Mengembangkan pariwisata dan kerajinan daerah dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
3. Mempromosikan Budaya: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah dapat mempromosikan budaya daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya.

4. Meningkatkan Kualitas Hidup: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memiliki 25 situs cagar budaya yang terdata, dan 0 situs cagar budaya yang dilestarikan. Dalam hal ini, pencapaian persentase budaya lokal yang dilestarikan pada Tahun 2025 adalah sebesar 0% . Sedangkan pada Tahun 2024 pencapaian persentase budaya lokal yang dilestarikan adalah sebesar 52%.

Tahun	Jumlah Situs Cagar Budaya yang terdata	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Target	Capaian (%)
2023	22	11	50	50
2024	25	13	50	52
2025	25	0	57,67	0

Sumber: Bidang Kebudayaan Dinas P&K Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah adalah sebagai berikut:

- **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah pada Tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 0%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 57,67%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **0% (Kategori Kinerja: Sangat Rendah; Predikat Kinerja: Belum Mencapai Target).**

- ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***

Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dalam dua tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2024, nilai persentase tercatat sebesar 52%, sedangkan pada tahun 2025 menurun dengan capaian 0% dikarenakan adanya perubahan peraturan.

- ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah pada Tahun 2025 adalah sebesar 0%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 57,67%. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 57,67% lagi.

- ***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Faktor penyebab belum tercapainya Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan pada Tahun 2025, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap cagar budaya yang dilestarikan harus memiliki SK Wali Kota.

Realisasi kinerja Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan Tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Solusi yang akan dilakukan ke depan adalah membangun kerja sama dan jaringan dengan organisasi lain, kepemimpinan dan pengelolaan yang efektif, serta mendorong pemenuhan target evaluasi kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.**

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Program Pengembangan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan total anggaran sebesar Rp. 321.944.384 dan terealisasi sebesar Rp. 307.077.354 atau capaian kinerja anggaran sebesar **95,38%**.
- Pelindungan Cagar Budaya dengan total anggaran Rp. 15.361.414 dan terealisasi sebesar Rp. 14.545.926 atau capaian kinerja anggaran sebesar **94,69%**.

Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU: 8. Rata-rata Pencapaian Program Masing-masing Daerah	Persentase Program pada Perangkat
--	---	-----------------------------------

8. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe mempunyai 9 Program

untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia}} \times 100\% \\ = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

2) Program Pengelolaan Pendidikan;

Mengikuti Perhitungan Rumus Angka Partisipasi Kasar (tercapai dengan capaian 99,49%)

3) Program Pengembangan Kurikulum;

$$\frac{\text{Jumlah Siswa Lulus}}{\text{Jumlah siswa yang mengikuti ujian}} \times 100\% \\ = \frac{5691}{5691} \times 100\% = 100\%$$

4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

$$\frac{\text{Jumlah Guru dan Tendik yang dilakukan pembinaan}}{\text{Jumlah guru yang ada}} \times 100\% \\ = \frac{140}{2665} \times 100\% = 5,25\%$$

5) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;

$$\frac{\text{Jumlah sekolah swasta yang memperoleh Izin}}{\text{Jumlah sekolah swasta mengajukan Izin}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{16} \times 100\% = 94\%$$

6) Program Pengembangan Kebudayaan;

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengembangan budaya yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pengembangan budaya yg direncanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

7) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;

$$\frac{\text{Jumlah sanggar seni yang dibina}}{\text{Jumlah keseluruhan sanggar seni}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

8) Program Pembinaan Sejarah;

$$\frac{\text{Jumlah Objek Sejarah yang diinventarisir}}{\text{Jumlah Keseluruhan Objek Sejarah}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{25} \times 100\% = 8\%$$

9) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

$$\frac{\text{Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total situs cagar budaya yang dimiliki daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{25} \times 100\% = 0\%$$

Maka, capaian tahun 2025 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{9} \times 100\% = 55,56\%$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- ***Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.***
Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 55,56%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **55,56% (Kategori Kinerja: Rendah; Predikat: Tidak Mencapai Target)**.

- ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***
Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap situs cagar budaya harus memiliki SK Wali Kota. Sehingga hal ini mempengaruhi capaian pada Program Urusan Kebudayaan.

- ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***
Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Tahun 2025 adalah sebesar **55,56%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **100%**. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 44,44% lagi. Dengan kata lain, pada tahun-tahun berikutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe wajib melaksanakan seluruh program agar mencapai target yang telah ditetapkan.

- ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, namun terdapat Program yang tidak tercapai dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Keterbatasan anggaran pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Kurangnya persyaratan dari sekolah dalam hal memperoleh izin operasional sekolah pada Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- Adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang mengharuskan setiap situs cagar budaya harus memiliki SK Wali Kota pada Program Pembinaan Sejarah dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pencapaian kinerja Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe mencapai target disebabkan oleh:

1. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe sering memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada pegawainya dalam setiap kesempatan. Selain itu, cara pemimpin dalam mengambil keputusan bergantung terhadap situasi yang ada. Apabila pemimpin memang membutuhkan masukan-masukan dari pegawai, maka pemimpin akan melakukan hal tersebut. Pemimpin sebagai top manajemen juga dapat mengambil keputusan sendiri, hal ini dilakukan apabila pemimpin memang tidak memerlukan masukan dari pegawai.

3. Kerjasama tim antar pegawai sangat solid. Tujuannya agar kinerja dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selain dukungan antar pegawai, salah satu indikator capaian kinerja yang baik yaitu adanya koordinasi yang baik antar pegawai.

▪ ***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.***

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan total anggaran sebesar Rp. 229.461.233.368 sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 214.070.299.012 atau capaian kinerja anggaran sebesar **93,29%**.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capain Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan					
1	Angka Kelulusan	Persen	100	70,66	141,52
2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	99,49	99,49	99,49
3	Angka Partisipasi Murni	Persen	87,65	96,83	92,24

4	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	98,17	96,92	101,29
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal					
5	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	44	95,04	46,30
6	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	Persen	27	90,99	29,67
Sasaran 3: Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Nilai Budaya					
7	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	4	95,04	4,21
Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
8	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	Persen	55,56	92,26	60,22
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2025					

Berdasarkan Tabel 3.11 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 8 (delapan) IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Angka Kelulusan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 100,91% (Sangat Efisien);
2. IKU: Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 99,49% (Sangat Efisien);
3. IKU: Angka Partisipasi Murni menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 92,24% (Sangat Efisien);
4. IKU: Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 101,29% (Sangat Efisien);
5. IKU: Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 46,30% (Cukup Efisien);
6. IKU: Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 29,67% (Kurang Efisien);

7. IKU: Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 4,21% (Tidak Efisien); dan
8. IKU: Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 60,22% (Cukup Efisien).

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 231.684.591	Rp. 205.265.839	88,60
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 175.743.476.335	Rp. 162.465.754.993	92,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 65.339.399	Rp. 65.107.899	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 432.051.174	Rp. 117.085.596	27,10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.011.749.608	Rp. 878.728.677	86,85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 239.852.560	Rp. 229.001.800	95,48
2. Program Pengelolaan Pendidikan			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 31.121.313.940	Rp. 30.685.555.753	98,60
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 14.584.107.300	Rp. 14.398.256.441	98,73
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 3.633.088.567	Rp. 3.552.903.600	97,79
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 1.150.557.227	Rp. 885.015.098	76,92
3. Program Pengembangan Kurikulum			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF	Rp. 0	Rp. 0	-
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Rp. 32.704.585	Rp. 16.694.897	51,05

Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan			
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Rp. 15.920.000	Rp.15.819.336	99,37
6. Program Pengembangan Kebudayaan			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 463.369.668	Rp. 446.487.625	96,36
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional			
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 122.250.000	Rp. 107.499.726	87,93
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp. 15.361.414	Rp. 14.545.926	94,69
9. Program Pengelolaan Permuseuman			
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rp. 598.407.000	Rp. 562.865.806	94,06
Jumlah	Rp. 229.461.233.368	Rp. 214.070.299.012	93,29

Sumber: DPA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025

Dari tabel diatas, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe dalam DPA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar Rp. 229.461.233.368, dan realisasi anggaran mencapai Rp. 214.070.299.012 atau serapan anggaran sebesar 93,29%, dengan demikian

maka dapat diketahui pada tahun anggaran 2025 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp. 15.390.934.356.-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Potret kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan baik. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe sebesar 93,29%. Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil mencapai target, dan secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025, diharapkan dapat terwujudnya pendidikan dasar yang berkualitas dalam rangka meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan keragaman budaya lokal.

Lhokseumawe, 26 Februari 2025
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWA,**


YUSWARDI, SKM, M.S.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740922 200012 1 002